## KLIPING MEDIA 2020

# KABUPATEN KEPAHIANG JUMAT, 17 JANUARI 2020

## SUMBER BERITA

#### **RAKYAT BENGKULU** MEDIA INDONESIA BENGKULU EKSPRESS **KOMPAS** X RADAR BENGKULU

### KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF

NETRAL

BAHAN PEMERIKSAAN

PERHATIAN KHUSUS

## Inspektorat Audit Kelengkapan SPJ OPD

RBI, KEPAHIANG - Inspektorat Daerah (Ipda) Kabupaten Kepahiang saat ini tengah mengaudit atau memeriksa kelengkapan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) setiap OPD di lingkup Pemkab Kepahiang. Hal tersebut untuk memastikan sejauh mana kesiapan dan kelengkapan SPJ masingmasing Organisasi Perangkat daerah (OPD). "Audit kelengkapan SPJ sudah dilakukan sejak Senin 13 Januari kemarin, dari 21 OPD yang sudah selesai baru 9 OPD," ungkap Kepala Inspektorat daerah Kepahiang, Harun, SE.

Sejauh ini lanjut Harun, belum ditemukan adanya SPJ OPD yang tidak lengkap. Ia berharap tidak ada semua SPJ yang dikeluarkan masing-

tidak ada masalah. Karena, SPJ itu nantinya akan diperiksa langsung oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Bengkulu. "Kita berharap tidak ada SPJ yang bermasalah. Semua OPD harus melengkapi SPJ sesuai dengan aturan yang ada. Dengan harapan pada saat audit dari BPK tidak ada lagi masing OPD lengkap dan. SPJ OPD yang bermasalah,"

terang Harun.

Sambungnya, BPK diperkirakan melakukan audit awal Februari 2020 mendatang. Jadi, sebelum BPK melakukan audit, Inspektorat lebih dulu melakukan pemeriksaan kelengkapan SPJ masing-masing OPD. Sehingga pada saat pemeriksaan BPK nantinya tidak ada lagi SPJ yang bermasalah. "Berdasarkan Pera-

turan Daerah Nomor 08 pasal 17 tahun 2016, bendahara SKPD hanya boleh dijabati satu orang maksimal selama 3 tahun, memasuki tahun keempat bendahara harus diganti. Mereka masih boleh menjadi bendahara tetapi harus pindah SKPD (tempat lain). Jangan sampai menjadi bendahara di SKPD melebihi 3 tahun," pungkasnya.(ide)